

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA KANTOR DESA SE-KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN

**Ni Komang Sintia Dwipayani¹
Putu Nuniek Hutnaleontina²**

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
email: sintiadwipayani123@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine and empirically test the clarity of budget targets, community participation, and government internal control systems on village fund management accountability. The factors that affect village fund management accountability are clarity of budget targets, community participation, and government internal control systems. The sample used in this study were 16 villages located in Marga District, Tabanan Regency with 80 respondents. The sampling method in this study used purposive sampling, data was collected using a questionnaire. The data analysis technique used multiple linear regression analysis. Based on the results of this study, it is stated that the clarity of budget targets and the government's internal control system has a positive effect on 1 accountability management 1 village funds, 1 while 1 community participation has no effect on 3 accountability 2 management 2 funds 3 villages.

Keywords: *Clarity of Budget Targets, Community Participation, Government Internal Control System, Accountability*

PENDAHULUAN

Terbitnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014, tentang desa membuat pemerintah Indonesia mulai memprioritaskan desa sebagai pintu utama dalam pembangunan nasional, dengan mewujudkan desa untuk memiliki hak khusus yang disebut otonomi desa, dimana desa diberi hak untuk menata dan mengelola pemerintahannya sendiri guna membangun dan mengembangkan perekonomian desa serta meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 pasal 1 ayat 2 mengenai Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 disebutkan jika “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan

digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat” (Dewi, 2020).

Dana desa umumnya sangat penting adanya untuk menunjang pemerataan pembangunan yang dilakukan pemerintah secara menyeluruh karena dana desa memiliki tujuan yaitu untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada pada masyarakat seperti mengatasi kemiskinan dan menurunkan jumlah pengangguran, membantu pemerataan pembangunan serta infrastruktur masyarakat desa. Aparatur desa dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban secara penuh dan dilakukan dengan penuh keterbukaan yang terkait dengan pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa yang cukup tinggi menimbulkan efek negatif yang akan terjadi seperti banyaknya koruptor, penyelewengan dana desa dan kasus suap yang akan menimbulkan banyak kerugian bagi Negara dan aparatur desa.

Komisi Pemberantasan korupsi menjelaskan bahwa peluang korupsi bisa terjadi karena bermula dari aspek penyalahgunaan kekuasaan dan dengan mudah bisa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dengan memanfaatkan kelemahan yang dimiliki oleh aparat desa. Aspek lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah aspek tata laksana seperti laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh aparatur desa yang belum memiliki standarr dan rawan manipulasi. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka daan dinyatakan dalam unit moneter meliputi semua kegiatan perusahaan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Salah satu hal penting yang harus di perhatikan dalam suatu penganggaran yaitu kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran berdampak pada pemaksiamalan penggunaan anggaran, sehingga dengan adanya sasaran anggaran maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan yang dilakukan oleh aparat desa.

Suatu parameter dari tinggi dan rendahnya partisipasi masyarakat sangat diperlukan kemampuan untuk mengukur suatu pemerintahan, agar mendapatkan suatu kepercayaan dari masyarakat. Hal itu menjadi indikator yang sangat penting bagi prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas penting pada pengelolaan dana desa guna menghadirkan kepastian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan jadi penghubung kesenjangan diantara pemerintah terhadap masyarakat (Aucoin dan Heintzmen, 2000).

Pengendalian dalam kegiatan dana desa sangat diperlukan dalam perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pengendalian dijalankan melalui sistem

pengendalian intern pemerintah (SPIP) sebagai standar pengendalian pelaksanaan dana desa agar proses operasi pemerintah berdasarkan prosedur yang sudah ditentukan.

Provinsi Bali sebagai salah satu penerima dana desa yang dibagikan kepada 636 desa se-Bali. Pada tahun 2015 alokasi dana desa untuk Provinsi Bali sebesar 185 miliar rupiah, tahun 2016 naik dua kali lipat menjadi 416 miliar, lalu menjadi 537 miliar sedangkan tahun 2018 menurun 7 miliar menjadi 531 miliar dan naik pada 2019 menjadi 630 miliar rupiah (www.djkg.depkeu.go.id). Kesiapan desa dalam mengelola dana tersebut menimbulkan kekhawatiran mengingat besarnya pendapatan yang diterima desa. Dibuktikan dengan temuan kasus penyelewengan dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Mengwitani. Realisasi penerimaan dana APBDesa Mengwitani tahun anggaran 2014 yang diterima sebesar Rp.6,5 miliar lebih . Kemudian dari total dana yang diterima, terealisasi pengeluarannya sebesar Rp 5,3 miliar jadi sisa anggaran sebesar Rp 1,2 miliar Diduga Bendahara Desa Mengwitani telah merugikan keuangan negara hingga 1,2 miliar lebih (Balipost, 2017). Dengan adanya kasus penyelewengan dana desa, maka adanya akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana desa

Berlandaskan pemaparan pada latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik guna mengadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa”.

Berlandaskan latar belakang penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimanakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kantor desa se - Kecamatan Marga?
2. Bagaimanakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kantor desa se - Kecamatan Marga?
3. Bagaimanakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kantor desa se-Kecamatan Marga?

Berlandaskan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Guna mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kantor desa se-Kecamatan Marga.

2. Guna mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kantor desa se-Kecamatan Marga.
3. Guna mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kantor desa se – Kecamatan Marga.

Berdasarkan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan pengetahuan keilmuan dalam menjalankan penelitian pada bidang akuntansi terutama yang berhubungan terhadap pengaruh kejelasan sasaran anggaran, partisipasi masyarakat serta sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kantor desa se-Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini harapannya bisa menyumbangkan masukan yang baik untuk aparatur desa dan pemerintah guna mengaplikasikan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

KAJIAN PUSTAKA

Teori stewardship merupakan teori yang menjelaskan dimana keadaan para manager tidak termotivasi oleh tujuan – tujuan individu namun lebih ditujukan terhadap sasaran hasil utama mereka guna kepentingan organisasi. Teori ini memperkirakan adanya hubungan yang kuat diantara kepuasan serta kesuksesan organisasi, yang menggambarkan maksimalisasi tujuan organisasi.

Menurut Kenis ((1979), kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan organisasi. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran dalam penggunaan dana oleh pemerintah desa, maka dapat mendorong terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa .

Partisipasi adalah seseorang dengan sadarnya terlibat berinteraksi sosial dalam situasi tertentu(wazir, 1999). Sedangkan Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pemahaman masalah dan kemampuan yang ada pada masyarakat, pemilihan dan

pengambilan keputusan tentang penyelesaian masalah, cara mengatasi masalah, dan keterkaitan masyarakat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah yaitu proses yang tidak terpisahkan dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan .

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan suatu tanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa, yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa.

Penelitian terdahulu yang dianggap relevan sebagai bahan acuan dalam penelitian ini adalah Pramayoga dan Ramantha (2020) dengan judul penelitian pengaruh kejelasan sasaran anggaran kompetensi aparatur desa dan kepemimpinan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur desa, dan kepemimpinan berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana.

Supadmi (2018) dengan judul penelitian pengaruh kapasitas sumber daya manusia, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan keuangan pada akuntabilitas pengelola dana desa di Kota Denpasar. Hasil Penelitian ini menyatakan pengaruh kapasitas sumber daya manusia, kejelasan sasaran anggaran serta sistem pelaporan keuangan berpengaruh positif serta signifikan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kota Denpasar.

Umaira (2019) dengan judul penelitian pengaruh partisipasi masyarakat kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian tersebut menyatakan jika variabel partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia serta pengawasan baik secara parsial ataupun simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Atiningsih(2019) dengan judul penelitian pengaruh kompetensi aparatur pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap kuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini menunjukkan kompetensi aparatur pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Arfiansyah (2020) dengan judul penelitian pengaruh sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desadan sistem pengendalian intern pemerintah mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa .

Martini (2019) dengan judul penelitian sistem pengendalian intern pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini menyatakan jika secara parsial serta simultan komponen GICS berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berlandaskan penelitian terdahulu maka, peneliti menggunakan variabel kejelasan sasaran anggaran, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa .

Berdasarkan uraian beberapa pengertian dan penelitian diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Kejelasan sasaran anggaran merupakan seberapa jauh sasaran anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik yang bertujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramayoga (2020) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Supadmi (2018) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perumusan hipotesis adalah sebagai berikut :

H₁ : Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas sangat berkaitan dengan partisipasi masyarakat karena, apabila tidak ada partisipasi dari masyarakat maka setiap kegiatan tidak akan berjalan dengan lancar. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Atiningsih (2019) menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif serta signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Siti Umaira (2019) menunjukkan jika partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perumusan hipotesis adalah sebagai berikut :

H₂ : Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

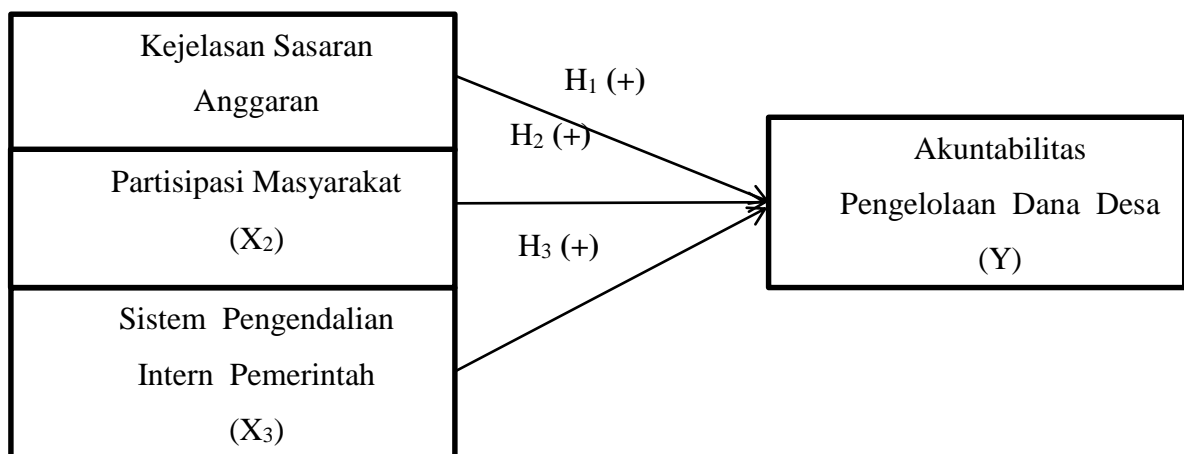
Adanya sistem pengendalian intern pemerintah sangat penting untuk mencapai kondisi yang efektif dan efisien. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arfiansyah (2020) menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Martini (2019.) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perumusan hipotesis adalah sebagai berikut :

H₃ : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa .

METODE PENELITIAN

Beberapa faktor yang dianggap peneliti mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kejelasan sasaran anggaran, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian intern pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran (X₁) merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik untuk tujuan organisasi. Partisipasi masyarakat (X₂) yaitu masyarakat terlibat ikut serta pada proses pengidentifikasian permasalahan dan potensi yang ada pada masyarakat. Sistem pengendalian intern pemerintah (X₃) merupakan perubahan yang berhubungan pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun kerangka pemikiran untuk penelitian ini sebagai berikut :

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa



Gambar 3.1. Kerangka berpikir

Variabel terikat (dependen variable) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (independen variable). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) diukur dengan indikator mengadopsi serta dimodifikasi dalam penelitian Putra (2019) menurut Zeyn (2011)

yakni sebagai berikut : 1). Rumusan perencana keuangan, 2). Pelaksanaan serta pembiayaan kegiatan, 3). Mengadakan evaluasi atas kinerja keuangan, 4). Realisasi pelaporan keuangan.

Kejelasan sasaran anggaran yakni seberapa jauh tujuan anggaran ditentukan dengan jelas serta spesifik terhadap tujuan organisasi. Variabel ini diukur melalui indikator yang diadopsi dan dimodifikasi dari Locke serta Latham (1984) dalam penelitian Putra (2013), yang terdiri atas : 1). Tujuan, 2). Kinerja, 3). Standar, 4). Jangka waktu, 5). Sasaran prioritas, 6). Tingkat Kesulitan, 7). Koordinasi.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pemahaman masalah dan kemampuan yang ada pada masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang penyelesaian masalah. Variabel ini mengadopsi dan dimodifikasi Werimon (2005) dalam penelitian Utari (2019), yaitu sebagai berikut : 1). Pemberian informasi, 2). Konsultasi, 3). Kemitraan, 4). Pendelegasian, 5). Keaktifan warga, 6). Keterlibatan dalam pengambilan keputusan, 7). Tenaga.

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah yakni proses yang integral pada tindakan serta kegiatan yang dijalankan dengan terus menerus oleh pimpinan serta semua pegawai guna memberikan keyakinan mencukupi dari terselenggaranya tujuan organisasi lewat kegiatan yang efektif serta efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X_3) mengadopsi dan di modifikasi berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 dalam penelitian Putri (2019) yaitu sebagai berikut : 1). Lingkungan pengendalian, 2). Penilaian resiko, 3). Kegiatan Pengendalian, 4). Informasi dan komunikasi, 5). Pemantauan.

Populasi merupakan keseluruhan dari objek ataupun subjek yang akan diteliti untuk mendapatkan hasil dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua perangkat desa yang berjumlah 208 orang aparatur yang berada di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan dengan jumlah desa sebanyak 16 desa yang tertera pada lampiran 2.

Sampel adalah sebagian dari karakteristik yang memiliki sifat yang sama dengan populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 80 responden yang tertera pada lampiran 2 dan ditentukan dengan teknik purposive sampling dan menggunakan metode penentuan sampel purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini yaitu aparatur perangkat desa di Kantor Desa Se-Kecamatan Marga dengan kriteria yakni merupakan (1) Perangkat Desa aktif bekerja sebagai kepala urusan perencanaan, kepala urusan tata usaha dan umum, kepala urusan keuangan, sekretaris desa serta kepala desa (2) Memiliki tingkat pendidikan

minimal SMA/SLTA sederajat (3) Memiliki masa kerja minimal 1 Tahun, karena sudah mengetahui secara jelas tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja/instansi yang dipimpinya.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Uji Kualitas Data

a. Uji validitas data

Uji validitas dimana suatu instrument dikatakan valid jika nilai pearson correlation terhadap skor total diatas 0,30 (Sugiyono, 2018).

b. Uji reliabilitas data

Uji reliabilitas dimana suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha > dari 0,70 (Ghozali, 2011).

2. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan data informasi untuk mengetahui hasil atau gambaran dari seluruh variabel dan dilihat dari hasil nilai rata-rata, nilai maksimal serta nilai minimal.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian dalam analisis regresi yang diperoleh dan tidak menyimpang. Adapun uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan guna mengetahui apakah data pada variabel yang dipakai untuk penelitian yakni data yang mempunyai distribusi normal dengan memakai Kolmogorov-Smirnov Test. Bila nilai sig > 0,05 maka data pada variabel itu berdistribusi normal (Ghozali, 2011).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas yaitu suatu kondisi dimana terjadinya korelasi antara variabel bebas yang dilihat dari bentuk model regresi dan memiliki nilai VIF yang tinggi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas mempunyai tujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu observasi ke observasi yang lain dalam model regresi. Apabila varians dari residual atau observasi ke observasi yang lain tetap disebut homokedastisitas. Sedangkan apabila varians

dari residual satu observasi ke observasi lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

4. Uji Kelayakan Model

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

b. Uji F

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).

5. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016).

6. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah suatu metode analisa yang dipakai guna menentukan ketepatan prediksi dari pengaruh yang timbul diantara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini yakni (Sugiyono, 2015).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Berikut ini adalah penjelasan dari hasil perhitungan dan model persamaan diatas :

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

α = Konstanta

X_1 = Kejelasan Sasaran Anggaran

X_2 = Partisipasi Masyarakat

X_3 = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

e = Residual (error)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian instrument penelitian yang baik harus memenuhi uji validitas serta realibilitas.

Tabel 4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Kelompok	Nomor Item	Validitas		Reliabilitas
		Korelasi (r)	Probabilitas (p)	Koefisien Alpha
X ₁	X ₁₁ -X ₁₇	0,604 s.d. 0,903	0,000	0,890
X ₂	X ₂₁ -X ₂₇	0,610 s.d. 0,810	0,000	0,806
X ₃	X ₃₁ -X ₃₈	0,633 s.d. 0,740	0,000	0,817
Y	Y ₁₁ -Y ₁₈	0,567 s.d. 0,842	0,000	0,876

Sumber : Lampiran 8

Berlandaskan hasil uji validitas menyatakan jika, instrumen penelitian yang terdiri dari item-item pertanyaan kejelasan sasaran anggaran (X₁), partisipasi masyarakat (X₂), sistem pengendalian intern pemerintah (X₃) dan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) yaitu valid, karena hasil dari semua variabel mempunyai nilai korelasi > 0,30.

Berlandaskan hasil uji reliabilitas menunjukkan jika, seluruh item-item pertanyaan dalam kuesioner yang dipakai yakni reliabel, karena semua item-item pertanyaan mempunyai koefisien alpha > 0,70. Alhasil layak dipakai selaku alat ukur instrumen dalam penelitian ini.

Analisis statistik deskriptif digunakan guna melihat distribusi data yang digunakan selaku sampel. Statistik deskriptif mencerminkan distribusi data yang tersusun atas nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, serta nilai standar deviasi atas data yang digunakan pada penelitian ini.

Tabel 4.2 Analisis Statistik Deskriptif**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kejelasan	80	25.00	35.00	31.9750	2.93376
Partisipasi	80	26.00	35.00	30.9500	2.63809
SPI	80	29.00	40.00	34.8250	3.08436
Akuntabilitas	80	30.00	40.00	35.8625	3.25204
Valid N (listwise)	80				

Sumber : Data primer diolah 2020

Darii tabel tersebut dapat diketahui bahwa :

1. Variabel kejelasan sasaran anggaran (X₁) mempunyai nilai *minimum* sebesar 25.00, nilai *maximum* sebesar 35.00, nilai *mean* sebesar 31.9750, nilai *mean* tersebut mencerminkan kecendrungan responden menjawab setuju pada 7 item pertanyaan mengenai kejelasan sasaran anggaran pada kuesioner dan *standar deviation* sebesar 2.93376.

2. Variabel partisipasi masyarakat (X_2) mempunyai nilai *minimum* sebesar 26.000, nilai *maximum* sebesar 35.000, nilai *mean* sebesar 30.9500, nilai *mean* itu menggambarkan kecenderungan responden menjawab setuju pada 7 item pertanyaan tentang partisipasi masyarakat pada kuesioner dan *standar deviation* sebesar 2.63809.
3. Variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X_3) memiliki nilai *minimum* yakni 29.00, nilai *maximum* sebesar 40.00, nilai *mean* sebesar 34.8250, nilai *mean* itu menggambarkan kecenderungan responden menjawab setuju pada 8 item pertanyaan tentang sistem pengendalian intern pemerintah pada kuesioner *standar deviation* sebesar 3.08436.
4. Variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) mempunyai nilai *minimum* sebesar 30.00, nilai *maximum* sebesar 40.00, nilai *mean* sebesar 35.8625, nilai *mean* itu menggambarkan kecenderungan responden menjawab setuju pada 8 item pertanyaan tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam kuesioner *standar deviation* sebesar 3.25204.

Uji asumsi klasik dimaksudkan guna menguji model regresi supaya sesuai terhadap kriteria *Ordinary Least Square* (OLS). Adapun hasil uji asumsi klasik diterangkan dibawah ini :

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas

			Unstandardized Residual
N			80
Normal Parameters ^{a,b}			
	Mean		.0000000
	Std. Deviation		1.89007485
Most Extreme	Absolute		.114
Differences	Positive		.083
	Negative		-.114
Test Statistic			.114
Asymp. Sig. (2-tailed)			.112 ^c

Sumber : Lampiran 9

Berdasarkan tabel diatas, nilai sig 0,112 diatas dari 0,05 alhasil bisa disimpulkan jika nilai residual atau model regresi berdistribusi normal.

Uji multikolonieritas yaitu suatu kondisi terjadinya korelasi diantara variabel bebas. Guna mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi bisa dilihat melalui tolerance value serta variance inflation factor (VIF). Adapun hasil pengujian yaitu :

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.040	2.778		1.094	.277		
	Kejelasan	.557	.103	.503	5.415	.000	.516	1.938
	Partisipasi	-.052	.144	-.043	-.363	.717	.324	3.086
	SPI	.478	.109	.453	4.384	.000	.416	2.403

a. Dependent Variable : Akuntabilitas

Sumber : Lampiran 9

Berdasarkan tabel diatas, nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi multikolonearitas.

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.. Hasil uji dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4.5 Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.922	1.584		.582	.562
	Kejelasan	.044	.059	.563	1.151	.100
	Partisipasi	.036	.082	.076	.443	.659
	SPI	-.043	.062	-.589	-.903	.205

a. Dependent Variable: aBRES

Sumber : Lampiran 9

Berdasarkan tabel 4.5 hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik memengaruhi variabel dependen nilai

absolut residual (Abres). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi bisa disimpulkan model regresi tidak mempunyai Heterokedastisitas.

Pengujian hipotesis pada penelitian ini memakai analisis Regresi Berganda. Hasil perhitungan dipaparkan dalam Tabel 4.6

Tabel 4.6 Tabulasi Output SPSS

Variabel	Standardized Beta	T-Hitung	Probabilitas (sig.)	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran (KSA)	0.503	5.415	0.000	Signifikan
Partisipasi Masyarakat (PM)	-0.043	-0.363	0.717	Tidak Signifikan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI)	0.453	4.384	0.000	Signifikan
Adjusted R Square	0.649			
F Statistik	49.664			
Probabilitas (p-value)	0.000			
Variabel Dependen	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa			

Sumber : Lampiran 10

Berdasarkan tabel diatas, bisa dibuatkan fungsi regresi dibawah ini.

$$\text{Akuntabilitas} = 0.503\text{KSA} - 0.043\text{PM} + 0.453\text{SPI} + e$$

Berdasarkan persamaan dijelaskan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran (X_1) berpengaruh positif dan signifikansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Variabel partisipasi masyarakat (X_2) berpengaruh positif tetapi tidak signifikansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X_3) berpengaruh positif serta signifikansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Uji F dipakai untuk apakah seluruh variabel bebas (X) memiliki pengaruh dengan bersama-sama kepada variabel terikat (Y). Berlandaskan hasil pengujian uji F dalam tabel 4.6 tersebut bisa diketahui jika p-value mendapatkan nilai 0,000 dibawah dari 0,05 hal itu artinya kejelasan sasaran anggaran, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian intern pemerintah secara bersama-sama berpengaruh signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Uji Determinasi (R^2) dipakai guna mengukur seberapa jauh kemampuan model untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Berlandaskan hasil perhitungan yang bisa diketahui dari tabel 4.6 diatas, didapat nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,649 menunjukkan jika 64,9% variasi nilai akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh faktor-faktor kejelasan sasaran anggaran, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian intern pemerintah sedangkan sisanya 35,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas, yaitu kejelasan sasaran anggaran (X_1), partisipasi masyarakat (X_2), sistem pengendalian intern pemerintah (X_3) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Uji Hipotesis (Uji t) bisa diadakan dengan membandingkan tingkat signifikan setiap variabel bebas dengan $\alpha = 0,05$. Bila nilai signifikansi $> 0,05$ maka variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependent, sementara bila nilai signifikansi $< 0,05$ maka variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Adapun hasil analisis uji t dapat dijelaskan dibawah ini :

1. Variabel kejelasan sasaran anggaran (X_1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai t_{hitung} sebesar 5,415. Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat kesalahan yaitu 0,05 atau ($0,000 < 0,05$) dengan demikian maka kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Maka, hipotesis 1 pada penelitian ini diterima.
2. Variabel partisipasi masyarakat (X_2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,717 dengan nilai $t_{hitung} = 0,363$. Nilai signifikansi 0,717 lebih besar dari tingkat kesalahan yaitu 0,05 atau ($0,717 > 0,05$) dengan demikian maka partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Maka, hipotesis 2 dalam penelitian ini ditolak.
3. Variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X_3) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan t_{hitung} 4,384. Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat kesalahan yaitu 0,05 atau ($0,000 < 0,05$) dengan demikian maka sistem pengendalian intern

pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Maka, hipotesis 3 dalam penelitian ini diterima.

PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel 4.6 variabel kejelasan sasaran anggaran menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 5,415 serta memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil itu menyatakan jika nilai signifikansi kejelasan sasaran anggaran lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien yakni 0,503. Hal tersebut artinya kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki dampak penguatan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin jelas sasaran anggaran maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga meningkat. Anggaran merupakan hal yang paling utama dalam upaya untuk memperoleh akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga kejelasan sasaran anggaran menjadi hal yang sangat penting untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil dari penelitian ini menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan dijadikan referensi dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramayoga (2019) menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Supadmi (2018) juga menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan tabel 4.6 variabel Partisipasi Masyarakat menunjukkan nilai t_{hitung} yakni – 0,363 dan mempunyai nilai signifikan yakni 0,717. Hasil itu menunjukkan bahwa nilai signifikan Partisipasi Masyarakat lebih besar dari 0,05 dengan koefisien sebesar – 0,043. Partisipasi masyarakat bernilai negatif karena mayoritas distribusi data variabel partisipasi masyarakat berbanding terbalik dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Maka dari itu, hipotesis 2 dalam penelitian ini ditolak. Hal ini disebabkan karena perangkat desa yang diberikan tugas dan tanggungjawab wajib melayani dan memberikan informasi yang jelas dalam bentuk laporan yang akuntabel, sehingga adanya keterlibatan dari masyarakat dalam pemantauan dan penilaian mengenai pengelolaan dana desa, maka dapat menurunkan tingkat kecurangan atau kesalahan prosedur yang dilakukan oleh perangkat desa. Partisipasi adalah metode guna meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pada pengisian kuesioner yang dibagikan dan pernyataan yang tertera lebih menjadikan masyarakat tersebut sendiri tidak berinteraksi secara penuh. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh

Kartika (2020) menyatakan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan tabel 4.6 variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 4,384 serta mempunyai nilai signifikan sebesar 0,000. Hasil tersebut menyatakan jika nilai signifikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien yakni 0,453. Hal ini menunjukkan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Maka dari itu hipotesis 3 dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memberikan keyakinan memadai terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan perundang-undangan sehingga memenuhi kriteria akuntabilitas. Pemerintah desa telah menjalankan asas-asas dalam pengendalian intern, baik dalam pencapaian tujuan secara efisien dan efektif, pelaporan pengelolaan keuangan secara andal, mengamankan aset dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arfiansyah (2020) menyatakan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Martini (2019) juga menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Merujuk pada hasil pembahasan analisis data dengan pembuktian terhadap hipotesis, maka simpulan yang bisa ditarik yaitu:

1. Kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin jelas sasaran anggaran maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga meningkat.
2. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut disebabkan pada pengisian kuesioner yang dibagikan dan pernyataan yang tertera lebih menjadikan masyarakat itu sendiri tidak berinteraksi dengan penuh, jadi partisipasi merupakan hal utama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
3. Sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah memberikan keyakinan memadai terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan perundang-undangan sehingga memenuhi kriteria akuntabilitas.

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan dan dijelaskan diatas, maka saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian, tidak hanya di Kecamatan Marga, ditempat atau wilayah lain yang juga butuh guna diteliti, serta pula guna menambah variabel lain yang bisa mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian berikutnya disarankan guna tidak sekedar menyebar kuesioner saja namun juga dibarengi wawancara dengan langsung terhadap responden supaya lebih memperoleh hasil yang tambah akurat

Daftar Pustaka

- Aprilya, Astri. (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Umum dan Riset Akuntansi*. Vol.9.No.3
- Artha, I.M. A. S, & Rasmini, N.K. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.26, No.1.
- Arfiansyah. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*. Vol.3, No.1.
- Atiningsih, Aulia. (2019).. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa,Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*. Vol.10, No.1.
- Aucoin, Peter dan Heintzman, Ralph. (2000). The Dialectics of Accountability for Performance in Publik Management Reform. *International Review of Administrative Sciences*. Vol. 66 : 45-55
- Aziiz, Sawitri. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*. Vol.6.No.2.
- Dewi. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.26.No.2.
- Dewi, N.W.A. Erlinawati. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Desa Se-Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*. Edisi Juli 2020.

- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan 2IV. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Cetakan VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriani, Nadirsyah dkk. (2019). Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Survey pada Desa Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol.7.No.1.
- Kenis, I. 1979. *Effect on Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performance*. *The Accounting Review*, Vol. LIV, No. 4 pp : 707
- Kholmi, Masiyah. (2011). Tafsir atas Konsep Akuntabilitas Partai Politik (studi hermeneutika pada sebuah DPD Partai Politik di Jawa Timur). Desertasi tidak terpublikasikan.
- Kirana, Elan. (2018). Pengaruh Tata Kelola Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*. Vol.6.Edisi.12.
- Mada, Sarifudin. Kalangi, Lintje, dan Gamaliel, Hendrik. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*. Vol.8, No.2.
- Martini, Naufal dkk. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya*. Vol.2, No.1.
- Matani, Linda. (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung Di Kota Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*. Vol.5.No.3.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 pasal 1 ayat 2 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Pramayoga, I.W.Ramantha. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, dan Kepemimpinan pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Udayana*. Vol.30, No.1.

- Putra, Darma. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana.
- Putra, Deki. (2013). Pengaruh Akuntabilitas Public dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 1 (1).
- Putri. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia.
- Supadmi, D.G.D. Suputra. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Keuangan pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kota Denpasar. *Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana*. Vol.13, No.2.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (MixedMethods)*. Bandung : Alfabeta.
- Umaira, Adnan.(2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. Vol.4, No.2.
- Utari, Putri. (2019). Implementasi Budaya THK dalam Pengaruh OPD dan Partisipasi Masyarakat pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 28, hal . 1715-1731.
- Werimon, Simson. (2005). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Public Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Studi Empiris Di Provinsi Papua. Universitas Diponegoro Semarang.
- Zeyn, Elvira. (2011). Pengaruh Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan*.